

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Pemahaman Pancasila dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata dasar paham, yang berarti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan suatu proses atau cara memahami. Pemahaman atau *comprehension* dapat juga diartikan menguasai sesuatu, perlu diingat bahwa pemahaman tidak sekedar tahu, tetapi bisa menangkap maknanya.

Menurut Oemar Hamalik (1994:80) bahwa “pemahaman adalah kemampuan untuk menguasai pengertian, pemahaman tampak pada alih bahan dari satu bentuk lainnya, penafsiran dan memperkirakan”.

Selanjutnya, Anwar Arifin dalam Muzzamil (2010:13) menjelaskan bahwa “pemahaman adalah sebuah proses persepsi yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterikatan yang terjadi dalam keterikatan yang terjadi dalam keseluruhan”. Jadi, pemahaman merupakan suatu proses persepsi atas keterhubungan antara beberapa faktor yang saling mengikat secara

menyeluruh dan persepsi diartikan sebagai penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak.

Kemudian pendapat lain dari Djaali dalam Mardiana (2010:10) bahwa “pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri”.

Bedasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemahaman adalah pengertian atau mengerti tentang sesuatu, mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, sebab apa, bagaimana dan untuk apa.

b. Pengertian Pancasila

Untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila meliputi lingkup pengertian secara etimologis, pengertian secara historis dan pengertian secara terminologis. Kaelan (2004:20)

1. Pengertian Pancasila Secara Etimologis

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah lima prinsip atau asas.

2. Historis Pancasila

a. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

1. Prikebangsaan;

2. Prikemanusiaan;
 3. Priketuhanan;
 4. Prikerakyatan;
 5. Kesejahteraan Rakyat
- b. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
3. Mufakat/Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan;

Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:

1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
3. Ketuhanan YME.

Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.

- c. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;

3. Pengertian Pancasila Secara Termitologis

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara RI yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri dari 2 bagian yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal 1 aturan peradilan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat.

Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat pula rumusan-rumusan pancasila sebagai berikut :

1. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Berlaku tanggal 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

- a. Ketuhanan YME
- b. Pri Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kerakyatan
- e. Keadilan Sosial

2. Dalam UUD (undang-undang dasar sementara 1950)

Undang-undang Dasar 1950, berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, rumusan Pancasila yang tercantum dalam konstitusi RIS sbb :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Peri kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kerakyatan
- e. Keadilan sosial.

Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian Pancasila tersebut yang sah dan benar secara konstitusional adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan ketentuan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000.

c. Pancasila sebagai Dasar Negara

Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara”.

Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan.

Selanjutnya, Burhanuddin Salam (1996:49) “selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum”. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.

Kaelan (2004:110) mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah “merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, Pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran”.

Drikarja dalam P.J Suwarno (1993:49) “Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum”.

Menurut Djaenudin Harun (2008:33) “Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara”.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat obyektif-subyektif. Sifat subyektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif – universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud.

d. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu *iden* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata *logi* yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas*. (AL-Marsudi, 2001:57).

Selanjutnya, Kaelan (2004:114) berpendapat bahwa “ideologi ialah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-

kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan dan keagamaan”.

A. Kosasih Djahiri (1997:40) mengemukakan bahwa “ideologi adalah seperangkat nilai filsafat sosial dan politik yang mendasar pada suatu masyarakat atau suatu kebudayaan, ideologi dapat bersumber dari proses pertumbuhan suatu bangsa dan kebudayaan atau ia dibina melalui propaganda”.

Notonegoro dalam Djaenudin Harun (2008:4) mengemukakan bahwa:

Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan yang antara lain memiliki ciri:

- 1) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
- 2) Mewujudkan suatu asas kerokhaniaan, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Sedangkan Muhammad Erwin (2011:36) cenderung memandang “ideologi sebagai sistem ajaran tentang makna kehidupan, tentang nilai-nilai dasar dan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak”.

Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita simpulkan Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggapi sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu.

Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia.

Menurut Padmo Wahjono “Pandangan hidup adalah sebagai suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup”. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila> akses 29 Juli 2011)

A. Kosasih Djahiri (1997:23) “pandangan hidup adalah konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik”.

Burhanuddin Salam (1996:44) “pandangan hidup suatu bangsa adalah inti sari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah

menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat indonesia, maka pandangan hidup dijunjung tinggi oleh warganya kerana pandangan hidup bangsa pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

f. Makna Nilai-nilai Sila Pancasila

Sesuai dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 kelima sila Pancasila dijabarkan dalam 45 butir pengamalan.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Butir-butir Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing
- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Butir-butir Nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab:

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

Butir-butir Nilai Sila Persatuan Indonesia:

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

Butir-butir Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan:

- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- f. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

- j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Butir-butir nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

g. Penjabaran Nilai-Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan.

Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian diantaranya:

1. Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual.

Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasa pula.

2. Seluruh Rakyat Indonesia

Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik

Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di negara lain.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama.

Keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Jimmy Hasoloan (2008:74) mengemukakan bahwa nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi:

- a. *Keadilan distributif*, yaitu dalam suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam kehidupan bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. *Keadilan legal* (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. *Keadilan komutatif* yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan, dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan

negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

h. Implementasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran PPKn

Nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, guru menumbuhkan kesadaran diri pada siswa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa misalnya melalui peringatan hari-hari besar keagamaan, melakukan salat jamaah di sekolah, doa bersama sebelum dan sesudah belajar, latihan berkorban dan mengumpulkan beras fitrah dalam menghadapi lebaran, saling menghormati antar umat beragama, membantu orang lain yang tertimpa musibah walaupun berbeda agama.

Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya seperti guru secara bertahap memberikan bimbingan, dan kesadaran bahwa semua pendukung kegiatan di sekolah demi keberhasilan peserta didik itu sendiri dalam mengikuti proses pendidikan, melalui motivasi, pemberian contoh-contoh keteladanan khususnya sopan santun etika bergaulan, cara belajar baik, sikap saling menolong, kebiasaan menyampaikan salam yang mencerminkan keramahan terhadap sesama untuk mewujudkan manusia yang berbudi pekerti luhur.

Sila persatuan Indonesia, misalnya seperti guru menumbuhkan kesadaran diri untuk memahami hakekat manusia sebagai makhluk sosial melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), penghijauan sekolah, pencinta alam, upacara bendera, kerja bakti di lingkungan sekolah sebagai salah satu bukti siswa mencintai tanah air, serta mengenal budaya-budaya yang

beraneka ragam di Indonesia sehingga mereka lebih mencintai bangsanya sendiri.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, contohnya antara lain guru membimbing siswa melakukan pelatihan pengambilan keputusan dalam suatu bentuk musyawarah melalui bermain peran dalam pemilihan pengurus OSIS, diskusi kelas dan rapat-rapat OSIS. Dengan demikian guru menanamkan arti penting musyawarah.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, guru menumbuhkan sikap bertanggung jawab dengan mendiskusikan hak dan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat dan warga negara yang memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong melalui tugas piket, memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, menengok teman yang sakit, mengumpulkan dana sebagai ungkapan bela sungkawa pada keluarga yang meninggal.

2. Sikap Sosial

a. Pengertian sikap

Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia, sebagai gejala atau kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperolehnya informasi mengenai sikap seseorang adalah penting sekali. Sikap dapat memberikan arah

kepada tingkah atau perbuatan seseorang tersebut untuk menyenangkan dan menyukai sesuatu atau sebaliknya.

Menurut Sudjana dan Ibrahim (1989:107) “sikap pada hakekatnya adalah kecenderungan perilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang pada dirinya”.

Petty Cocopio dalam Azwar (2000 : 6) ”Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau issue”. Selanjutnya menurut Heri Purwanto (1998:62) ”sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek. Sikap dapat diterjemahkan sebagai sikap kesediaan bereaksi terhadap suatu objek”.

Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu (Azwar 2000 : 23):

1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.
2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional.
3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi perasaan dan kecenderungan potensial untuk bereaksi yang merupakan hasil interaksi antara komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling bereaksi di dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek.

b. Ciri-ciri Sikap

Ciri-ciri sikap adalah menurut Gerungan (2004:163):

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan obyeknya.
2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
4. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

c. Pengertian Sikap Sosial

Sikap berarti kecenderungan yang bersifat tetap yang ada pada diri seseorang atau individu untuk bereaksi secara positif atau negatif terhadap kejadian yang berasal dari lingkungan. Sikap ini cenderung bersifat pro atau kontra terhadap suatu objek berdasarkan penilaian atau perasaan emosional. Maka dari itu perkembangan sosial anak perlu diperhatikan agar anak memiliki mentalitas yang tangguh dalam menyikapi kehidupan sosialnya, karena sikap sosial cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial. Karena sikap sosial cenderung berdasarkan pengalaman maka proses pendidikan yang diterima cenderung mempengaruhi pada setiap tahap proses perkembangan sosialnya, sehingga tumbuh rasa sosial yang menjadi dasar interaksinya di masyarakat.

Menurut Kartini Kartono (1994:297) “sikap sosial merupakan organisasi dari unsur-unsur kognitif, emosional dan momen-momen kemauan, yang khusus dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lampau, sehingga sifatnya sangat dinamis dan memberikan pengarahan pada setiap tingkah laku”.

Selanjutnya menurut R. Soetarno (1993:41) “sikap sosial adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek sosial, yang biasanya diarahkan kesuatu objek seperti benda, orang, peristiwa, pemandangan, lembaga, norma-norma dan lain-lain”.

Menurut Gordon Allport dalam Azwar (1995:5) “sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan”.

Menurut Mar’at (1984:9) “sikap merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang bersosialisasi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Jika sikap mengarah pada obyek tertentu, berarti bahwa penyesuaian diri terhadap obyek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesiediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap obyek”.

Sikap sosial menurut W.A Gerungan (2004:161):

Sikap *attitude* (sikap sosial) dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap obyek sosial dan menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap obyek sosial, dan biasanya *attitude* sosial itu di nyatakan tidak hanya oleh seorang saja, melainkan juga oleh orang-orang lainnya sekelompok atau masyarakat.

Selanjutnya, Abu Ahmadi (2007:149) mengemukakan bahwa “sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial”. Sikap sosial dinyatakan tidak oleh seorang saja tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. Objeknya adalah objek sosial (objeknya banyak orang dalam kelompok) dan dinyatakan berulang-ulang. Misalnya, sikap masyarakat terhadap bendera kebangsaan. Mereka selalu menghormatinya dengan cara khidmat dan berulang-ulang pada hari-hari nasional di negara-negara tersebut. Contoh lainnya, sikap berkabung seluruh anggota kelompok karena meninggalnya seorang pahlawannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap sosial adalah suatu pandangan yang bersifat afektif baik positif maupun negatif dari seseorang terhadap suatu objek sosial, baik berupa benda, orang, peristiwa, pemandangan, lembaga, norma-norma dan lain-lain, yang bersumber dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya, unsur-unsur kognitif, emosional dan keadaan masa lampau. Sikap cenderung hasil dari hasil pembelajaran, pendidikan atau pengalaman masa lalu yang diterimanya. Sikap cenderung dinamis dan berubah sesuai dengan kondisi yang dialami individu.

d. Bentuk-bentuk Sikap Sosial

Dalam pergaulan sehari-hari, tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan beraktivitas, dari kenyataan inilah setiap orang bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan perkembangan masing-masing individu tersebut. Dengan demikian, setiap orang harus mampu berinteraksi dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Adapun bentuk-bentuk sikap sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu sikap sosial positif dan sikap sosial negatif.

1. Sikap Positif

Dalam buku *Interaksi Sosial* dijelaskan bahwa: “Bentuk sikap sosial yang positif seseorang yaitu berupa tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas” (Nawawi, 2000: 33). Selanjutnya dalam buku *Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial* dijelaskan bahwa: “Sikap sosial dapat dilihat dari adanya kerjasama, sikap tenggang rasa, dan solidaritas” (Soetjipto dan Sjafoedin, 1994 : 44).

Dari kedua pendapat tersebut diatas, maka tidak ada perbedaan yang mendasar dimana yang termasuk dalam bentuk sikap sosial adalah aspek kerjasama, aspek solidaritas, dan aspek tenggang rasa. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat dari masing-masing bentuk-bentuk sikap sosial tersebut.

a. Aspek Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu hubungan saling bantu membantu dari orang-orang atau kelompok orang dalam mencapai suatu tujuan.

Dalam buku Psikologi Sosial dijelaskan bahwa: “ Kerjasama adalah kecenderungan untuk bertindak dalam kegiatan kerja bersama-sama menuju suatu tujuan” (Ahmadi, 2000 : 89). Dengan demikian sikap kerjasama adalah merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak dalam kegiatan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya dalam buku Pedoman Umum Budi Pekerti dijelaskan bahwa: “Ciri-ciri orang yang mampu bekerjasama dengan orang lain adalah berperan dalam berbagi kegiatan gotong royong tidak membiarkan teman atau keluarga mengalami suatu masalah secara sendiri dan bersikap mengutamakan hidup bersama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” (Depdikbud, 2001 : 28).

b. Aspek Solidaritas

Solidaritas mempunyai arti adanya kecenderungan seseorang dalam melihat ataupun memperhatikan keadaan orang lain. Menurut Gerungan dalam bukunya Psikologi Sosial dijelaskan bahwa: “Solidaritas dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam bertindak terhadap seseorang yang mengalami suatu masalah yakni berupa memperhatikan keadaan orang tersebut” (Gerungan, 1996 : 52). Dengan demikian solidaritas merupakan salah satu bentuk sikap sosial yang dapat dilakukan seseorang dalam melihat ataupun memperhatikan orang lain terutama seseorang yang mengalami suatu masalah.

c. Aspek Tenggeng Rasa

Dalam buku Psikologi Sosial dijelaskan bahwa: “Tenggeng rasa adalah seseorang yang selalu menjaga perasaan orang lain dalam aktifitasnya sehari-hari” (Ahmadi, 2000 : 34). Selanjutnya dalam buku Pedoman Umum Budi Pekerti dijelaskan bahwa: “Sikap tenggang rasa dapat dilihat dari adanya saling menghargai satu sama lain, menghindari sikap masa bodoh, tidak mengganggu orang lain, selalu menjaga perasaan orang lain, dalam bertutur kata tidak menyinggung perasaan orang lain, selalu menjaga perasaan orang lain dalam pergaulan dan sebagainya” (Depdikbud, 2001 : 29). Dengan demikian dari pendapat ahli jelaslah bahwa tenggang rasa adalah perwujudan sikap dan perilaku seseorang dalam menjaga, menghargai dan menghormati orang lain.

2. Sikap Negatif

Bentuk-bentuk sikap sosial seseorang yang negatif antara lain :

- a. Egoisme yaitu suatu bentuk sikap dimana seseorang merasa dirinya adalah yang paling unggul atas segalanya dan tidak ada orang atau benda apapun yang mampu menjadi pesaingnya.
- b. Prasangka sosial adalah suatu sikap negatif yang diperlihatkan oleh individu atau kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain.
- c. Rasisme, yaitu suatu sikap yang didasarkan pada kepercayaan bahwa suatu ciri yang dapat diamati dan dianggap diwarisi seperti warna kulit merupakan suatu tanda perihal inferioritas yang

membenarkan perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut.

- d. Rasialisme, yaitu suatu penerapan sikap diskriminasi terhadap kelompok ras lain. Misalnya diskriminasi ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan.
- e. Stereotip, yaitu citra kaku mengenai suatu ras atau budaya yang dianut tanpa memerhatikan kebenaran citra tersebut. Misalnya stereotip masyarakat Jawa adalah lemah lembut dan lamban dalam melakukan sesuatu. Stereotip tersebut tidak selalu benar, karena tidak semua orang Jawa memiliki sifat tersebut. (Ahmadi, 2007: 94).

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Sosial

Sarwono (1997:89) menjelaskan bahwa “Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial: (a) Faktor Indogen dan (b) faktor Eksogen”. Sementara itu menurut Prasetyo (1997:96) mengemukakan bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial adalah sebagai berikut: (a) Faktor Indogen; faktor pada diri anak itu sendiri seperti faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati dan (b) Faktor Eksogen; faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah”.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing faktor yang mempengaruhi sikap sosial tersebut.

a. Faktor Indogen

Faktor indogen adalah faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak yang datang dari dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga faktor yaitu: a) faktor sugesti, b) faktor identifikasi, dan c) faktor imitasi.

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat masing-masing faktor tersebut.

1. Faktor Sugesti

Nawawi (2000:72) mengemukakan bahwa “sugesti adalah proses seorang individu didalam berusaha menerima tingkah laku maupun prilaku orang lain tanpa adanya kritikan terlebih dahulu”. Sehubungan dengan hal ini pula Sarwono (1997:65) berpendapat bahwa “baik tidaknya sikap sosial anak dipengaruhi oleh sugestinya, artinya apakah individu tersebut mau menerima tingkah laku maupun prilaku orang lain, seperti perasaan senang, kerjasama”.

Dari pendapat ahli tersebut diatas, dapat dikatakan sugesti dapat mempengaruhi sikap sosial seseorang sedangkan anak yang tidak mampu bersugesti cenderung untuk tidak mau menerima keadaan orang lain, seperti tidak merasakan penderitaan orang lain, tidak bisa bekerjasama dengan orang lain dan sebagainya.

2. Faktor Identifikasi

Identifikasi dilakukan kepada orang lain yang dianggapnya ideal atau sesuai dengan dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi

(2000:82) bahwa “anak yang mengidentifikasikan dirinya dirinya seperti orang lain akan mempengaruhi perkembangan sikap sosial seseorang, seperti anak cepat merasakan keadaan atau permasalahan orang lain yang mengalami suatu problema (permasalahan)”.

Selanjutnya Sarwono (1997:88) menjelaskan bahwa:

Anak yang menganggap keadaan dirinya seperti persoalan orang lain ataupun keadaan orang lain seperti keadaan dirinya akan menunjukkan perilaku sikap sosial yang positif, mereka lebih mudah merasakan keadaan orang sekitarnya, sedangkan anak yang tidak mau mengidentifikasikan dirinya lebih cenderung menarik diri dalam bergaul sehingga lebih sulit untuk merasakan keadaan orang lain.

Menurut pendapat ahli tersebut diatas jelaslah bahwa seseorang yang berusaha mengidentifikasikan diri dengan keadaan orang lain akan lebih mampu merasakan keadaan orang lain, daripada seorang anak yang tidak mau mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain yang cenderung tidak mampu merasakan keadaan orang lain.

3. Faktor Imitasi

Imitasi dapat mendorong seseorang untuk berbuat baik.

Purwanto (1999:65) mengemukakan bahwa “Sikap seseorang yang berusaha meniru bagaimana orang yang merasakan keadaan orang lain maka ia berusaha meniru bagaimana orang yang merasakan sakit, sedih, gembira, dan sebagainya. Hal ini penting didalam membentuk rasa kepedulian sosial seseorang”.

Sedangkan Nawawi (2000:42) mengatakan pula bahwa “Anak-anak yang meniru keadaan orang lain, akan cenderung mampu

bersikap sosial, daripada yang tidak mampu meniru keadaan orang lain”.

Dari kedua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa imitasi dapat mempengaruhi sikap sosial seseorang, dimana seseorang yang berusaha meniru (imitasi) keadaan orang lain akan lebih peka dalam merasakan keadaan orang lain, apakah orang sekitarnya itu dalam keadaan susah, senang ataupun gembira.

b. Faktor Eksogen

Faktor eksogen adalah faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak dari luar dirinya sendiri. Dalam hal ini menurut Soetjipto dan Sjafioedin (1994:22) mengemukakan bahwa ”ada tiga faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak yaitu: “ a) faktor lingkungan keluarga, b) faktor lingkungan sekolah dan c) faktor lingkungan masyarakat”. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat masing-masing faktor tersebut.

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan tumpuan dari setiap anak, keluarga merupakan lingkungan yang pertama dari anak dari keluarga pulalah anak menerima pendidikan karenanya keluarga mempunyai peranan yang sangat penting didalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, Purwanto (1999:89) menjelaskan bahwa “anak yang tidak

mendapatkan kasih sayang, perhatian, keluarga yang tidak harmonis, yang tidak memanjakan anak-anaknya dapat mempengaruhi sikap sosial bagi anak-anaknya”.

Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwa keharmonisan dalam keluarga, anak yang mendapatkan kasih sayang serta keluarga yang selalu memberikan perhatian kepada anak-anaknya merupakan peluang yang cukup besar didalam mempengaruhi timbulnya sikap sosial bagi anak-anaknya.

Sehubungan dengan hal ini pula Sarwono (1997:66) mengemukakan bahwa “keluarga adalah bagian dari keperibadian anak sejak saat dilahirkan, pengaruh orang tua sangatlah besar, didikan orang tua yang terlalu keras, terlalu memberikan kebebasan akan mempengaruhi timbulnya permasalahan pada anak mudah merasakan keadaan orang lain”.

Dari pendapat ahli tersebut diatas, jelaslah bahwa lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya dalam membentuk sikap sosial seorang anak, apalagi dengan didikan orang tua yang penuh dengan kasih sayang, akan lebih mudah dalam membentuk sikap sosial pada anak.

2. Faktor Lingkungan Sekolah

Ahmadi (1996:65) menjelaskan bahwa “keadaan sekolah seperti cara penyajian materi yang kurang tepat serta antara guru dengan murid mempunyai hubungan yang kurang baik akan menimbulkan

gejala kejiwaan yang kurang baik bagi siswa yang akhirnya mempengaruhi sikap sosial seorang siswa”. Selanjutnya Nawawi (2000:66) mengemukakan bahwa “ada beberapa faktor lain di sekolah yang dapat mempengaruhi sikap sosial siswa yaitu tidak adanya disiplin atau peraturan sekolah yang mengikat siswa untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif ataupun tindakan yang menyimpang”.

Dari kedua pendapat ahli di atas, maka faktor lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi sikap sosial siswa adalah cara penyajian materi, perilaku maupun sikap dari para gurunya, tidak adanya disiplin atau peraturan-peraturan sekolah yang betul-betul mengikat siswa.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan tempat berpijak para remaja sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat. Anak dibentuk oleh lingkungan masyarakat dan dia juga sebagai anggota masyarakat, kalau lingkungan sekitarnya itu baik akan berarti sangat membantu didalam pembentukan keperibadian dan mental seorang anak, begitu pula sebaliknya kalau lingkungan sekitarnya kurang baik akan berpengaruh kurang baik pula terhadap sikap sosial seorang anak, seperti tidak mau merasakan keadaan orang lain.

Sarwono (1997:59) menjelaskan bahwa “lingkungan masyarakat yang bisa mempengaruhi timbulnya berbagai sikap sosial pada anak seperti cara bergaul yang kurang baik, cara menarik kawan-kawannya dan sebagainya”.

Selanjutnya Nawawi (2000:45) mengemukakan bahwa “pergaulan sehari-hari yang kurang baik bisa mendatangkan sikap sosial yang kurang baik, begitu sebaliknya di mana suatu lingkungan masyarakat yang baik akan mendatangkan sikap sosial yang baik pula terhadap anak”.

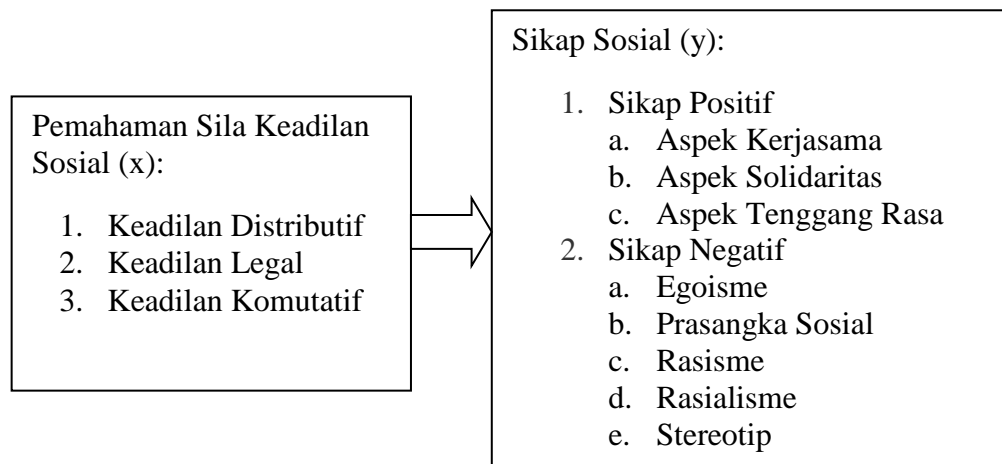
Dengan demikian dari uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, maka lingkungan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan sikap sosial seorang anak, begitu pula sebaliknya lingkungan masyarakat yang kurang baik akan menimbulkan sikap sosial yang kurang baik pula terhadap anak.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial adalah sebagai berikut: (a) Faktor Endogen; faktor sugesti, identifikasi, dan imitasi (b) Faktor Eksogen; faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah.

B. Kerangka Pikir

Implementasi nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dikalangan pelajar. Pemahaman nilai-nilai Pancasila, termasuk sila keadilan sosial, perlu dilakukan sejak dini, mengingat pelajar adalah generasi penerus bangsa. Sila keadilan sosial merupakan sila kelima dari Pancasila. Butir-butir nilai dari sila ini menghendaki agar kita memiliki sikap kekeluargaan, tolong menolong, suka bekerja keras, menjaga hak dan kewajiban. Keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi keadilan distributif, keadilan legal dan keadilan komutatif.

Pemahaman akan sila keadilan sosial ini berkaitan dengan pembentukan sikap sosial siswa. Agar terbentuk suatu sikap sosial yang positif maka perlu juga pemahaman sila keadilan sosial serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang mempunyai sikap sosial yang positif, akan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, juga mampu menghadapi heterogenitas kehidupan sosial sehingga penyimpangan-penyimpangan sosial dapat dihindarkan sejak dini, serta memiliki rasa empati terhadap orang lain dan lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:



C. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto (1997:67) hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai ada bukti melalui penyajian data atau pernyataan sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukakan”.

Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan kerangka pikir maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

Hi : Ada hubungan antara pemahaman sila keadilan sosial dengan sikap sosial siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012.

Ho : Tidak ada hubungan antara pemahaman sila keadilan sosial dengan sikap sosial siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012.